

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LatarBelakang**

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi, dimana rakyat memiliki peranan penting didalam urusan Negara. Prinsip-prinsip itu tertuang didalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 dimana ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum, prinsip-prinsip yang sebenarnya telah cukup kuat untuk menegakkan negara demokrasi dimana mekanisme mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan pada prinsip penghargaan hak-hak asasi manusia. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Baik secara langsung atau yang disebut demokrasi langsung dan melalui perwakilan atau yang disebut demokrasi perwakilan. Selain itu juga Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Dengan begitu, kekuasaan para pemimpin dan pejabat formal itu bukan muncul dari pribadinya, akan tetapi merupakan titipan rakyat atau merupakan kekuasaan yang dilimpahkan rakyat kepada para pemimpin-pemimpin di Negara ini.

Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahawa demokrasi semakin tampak di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat

merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Namun partisipasi itu dapat secara spontan, secara sinambung atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan tersebut dilakukan melalui pemilihan umum (PEMILU) baik pemilihan legislatif (PILEG) dan pemilihan Eksekutif (Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa). Melalui Pemilu, rakyat memilih figur yang dapat dipercaya yang akan mengisi jabatan Legislatif dan jabatan Eksekutif. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif.

Didalam pemilihan umum (PEMILU) yang sudah lama diadakan di Indonesia masih atau banyak hal yang harus diperbaiki, salah satunya yaitu

diadakannya pemilihan umum (PEMILU) secara serentak baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Pemilihan umum (PEMILU) secara serentak ini dilakukan untuk tujuan untuk menghemat biaya. Dimana, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pemilihan kepala daerah (PILKADA) ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien.

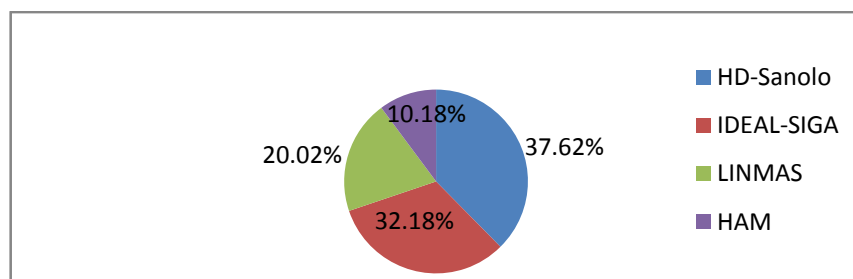
Salah satu pemilihan kepala daerah (PILKADA) dilakukan secara serentak yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Nias Selatan, dimana tercantum dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai landasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung tahun 2015. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Nias Selatan di ikuti oleh 4 pasangan calon yaitu nomor urut 1 yaitu Lianus Nduru, ST.MM dan Thomas Dachi, SH (LINMAS) dengan partai pendukung dari partai gerinda, nomor urut 2 yaitu Idealisman Dachi dan Siotaraizikho Gaho (IDEAL-SIGA) dengan partai pendukung PDIP, Partai NASDEM dan PKB, nomor urut 3 yaitu Dr. Hilarius Duha, SH.MH dan Sozanolo Nduru (HD-Sanolo) dengan partai pendukung PKPI, Partai Demokrat dan PBB dan nomor urut 4 yaitu Hadirat

Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th (HAM) dengan partai pendukung PAN, Partai Golkar dan Partai Hanura.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati urutan pertama diraih pasangan nomor urut 3 Dr. Hilarius Duha, SH.,MH dan Sozanolo Ndruru (HD-Sanolo) memiliki suara paling banyak dari ketiga pasangan lainnya dengan perolehan 48543 Suara (37,62%), diikuti oleh pasangan nomor urut 2 Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho (IDEAL-SIGA) dengan perolehan 41523 Suara (32,18%), nomor urut 1 Lianus Ndruru, ST.,MM dan Thomas Dachi, SH (LINMAS) dengan perolehan 25834 Suara (20,02%) sedangkan posisi paling akhir ada pasangan calon nomor 4 Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th (HAM) berada diposisi terakhir dengan perolehan 13143 Suara (10,18%). Jika dilihat dari persaingan 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hanya ada dua calon yang bersaing ketat karena hanya terpaut 5,44% saja.<sup>1</sup>

Berikut hasil perolehan suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 secara keseluruhan di Nias Selatan.

**Grafik 1.1. Hasil perolehan suara secara keseluruhan sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2015-2020**



<sup>1</sup><https://pilkada2015.kpu.go.id/niasselatankab/> tgl 3 bulan 4 pukul 12:32

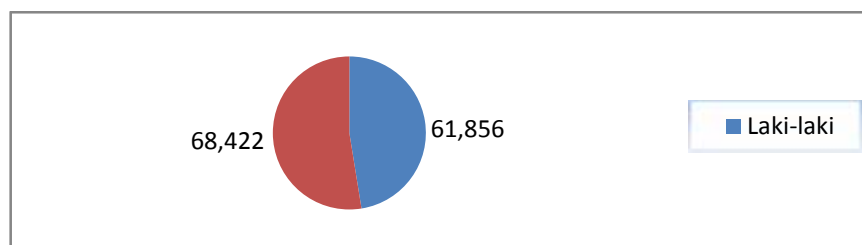
Hasil perolehan suara secara keseluruhan sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2015-2020 secara keseluruhan di Nias Selatan dihimpun dari 31 Kecamatan. DPT sebanyak 211.287 (Laki-laki: 102.202 dan Perempuan 108.837). Namun dari 211.287 yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 132.601 (Laki-laki: 61.856 dan Perempuan: 68.422), dengan persentase suara sah 97,12 %.

**Tabel 1.1 Presentase suara sah**

Suara Sah	128.734 Suara
Suara Tidak Sah	3.468 Suara
Jumlah	132.557 Suara

Dari data ini terlihat tingginya partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2015 secara keseluruhan 62,76%, dimana pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2011 hanya 89.180 yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2015 sebanyak 132.601.<sup>2</sup>

**Grafik 1.2. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dilihat dari jenis kelamin**



<sup>2</sup><https://pilkada2015.kpu.go.id/niasselatankab/> tgl 3 bulan 4 pukul 13:02

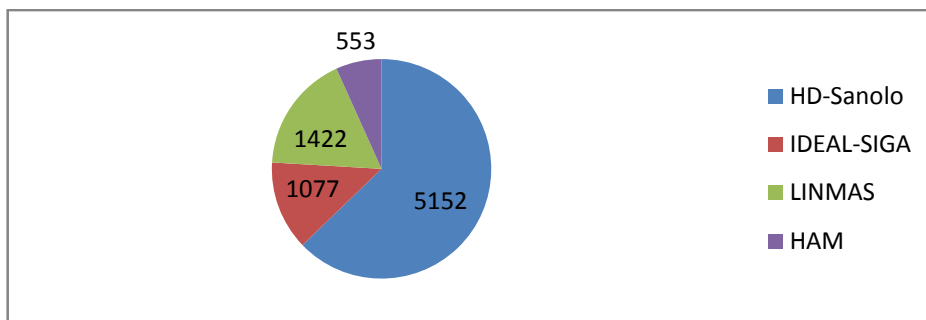
Partisipasi politik masyarakat Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2015-2020 sangat tinggi, tentunya ada beberapa hal yang mempengaruhi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Agar lebih spesifik, saya melakukan analisis di salah satu kecamatan yakni pada Kecamatan Gomo, Kecamatan ini terdiri 11 desa dan dalam pemilihan Pilkada serentak tahun 2015 lalu ini ada 2 kecamatan yang digabung dengan kecamatan gomo yaitu kecamatan hilimbowo dan kecamatan fanedanu yang terdiri dari 20 desa, karena masih kecamatan yang baru terbentuk atau dimekarkan maka segala proses pemilihannya dilaksanakan di kecamatan gomo. Jadi dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu di kecamatan gomo terdapat 31 desa. Pada kecamatan ini pasangan nomor urut 3 Dr. Hilarius Duha, SH.,MH dan Sozanolo Ndrurumasih unggul.

Berikut hasil perolehan suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2015-2020 secara keseluruhan di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan. Urutan pertama di duduki oleh nomor urut 3 Dr. Hilarius Duha, SH.,MH dan Sozanolo Ndruru dengan perolehan sebanyak 5152 suara (62,80%), disusul oleh pasangan nomor urut 2 Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho dengan perolehan sebanyak 1077 Suara (13,13%), pasangan nomor urut 3 Lianus Ndruru, ST.,MM dan Thomas Dachi, SH berada diposisi ketiga dengan perolehan sebanyak 1422 Suara (17,33%), sedangkan posisi terakhir dan suara paling sedikit berada dipasangan nomor urut 4 Hadirat Manao dan Pdt. Ami Hari Hondo, S.Th dengan perolehan sebanyak 553 Suara (6,74%).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><https://pilkada2015.kpu.go.id/niasselatankab/> tgl 3 bulan 4 pukul 13:17

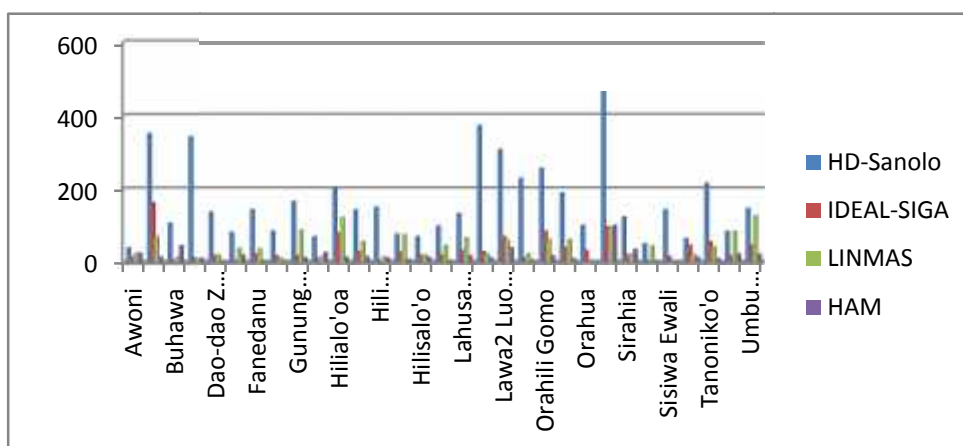
**Grafik 1.3. Hasil perolehan suara secara keseluruhan sah di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan**



Dilihat dari DPT sebanyak 14507 (Laki-laki: 6.961 dan Perempuan: 7.638), yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 8.204 (Laki-laki: 3.736 dan Perempuan: 4468).

Berikut hasil perolehan suara pasangan tiap calon Bupati dan Wakil Bupati di setiap desa di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan.

**Grafik 1.4. Hasil perolehan suara secara keseluruhan sah tiap Desa di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan**



Kesuksesan dalam pilkada serentak tersebut diatas yang berlangsung ketat merupakan kehendak rakyat nias selatan, dimana rakyat menjadi pemegang kunci dengan pemberian suara dalam menentukan pemimpin mereka selama periode (lima tahun) yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang. Oleh karena itu, semua perkembangan diatas tidak mungkin terjadi tanpa adanya kerangka hukum yang melandasi dan membingkainya. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen kedua) menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupatendan Kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan konstitusional ini kemudian diterjemahkan sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan kepala daerah (PILKADA).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Pada Periode 2015-2020” (studi kasus di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latarbelakang di atas, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Pada Periode 2015-2020 di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan?”



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Ada pun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimana partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Pada Periode 2015-2020 di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Peneliti, sebagai penelitian dan memperluas khasanah dan menambah pengetahuan di bidang ilmu politik, khususnya mengenai partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Pada Periode 2015-2020.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pesta demokrasi berupa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Pada Periode 2015-2020.
- c. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya penelitian dibidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya mengenai partisipasi politik.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Kata sistematis merupakan kata kunci yang berkaitan dengan metode ilmiah yang berarti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan.<sup>4</sup>Salah satu unsur yang paling penting peranannya dalam penelitian adalah menyusun landasan teori, karena landasan teori berfungsi sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari segi mana peneliti menyoroti masalah yang telah dipilih.

Menurut Sugiyono, teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, dalam kerangka teori ini penulis akan memaparkan beberapa teori-teori yang relevan dengan subjek penelitian.

#### **2.2. Partisipasi Politik**

##### **2.2.1. Definisi Partisipasi Politik**

Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata *part* yang berarti bagian. Jika kata *part* dikembangkan

---

<sup>4</sup>Jonathan Sarwano, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hal. 15

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2010, hal. 52

menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi *to participate*, yang bermakna turut ambil bagian.<sup>6</sup>

Partisipasi politik merupakan suatu konsep yang sangat populer dalam ilmu politik. Namun demikian penggunaannya sering bermacam- macam sehingga menimbulkan pemahaman konsep yang berbeda- beda, pada akhirnya kehilangan kegunannya. Istilah tersebut diterapkan pada aktifitas orang dari semua tingkat sistem politik.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi saat ini. Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun yang bersifat pasif dan bersifat langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level didalam sistem politik disebut partisipasi politik. Para ilmuwan komunikasi politik akan memandang bahwa partisipasi politik itu tidak lain dari pada reaksi khalayak politik sebagai salah satu bentuk efek politik dari sosialisasi politik atau komunikasi politik, berdasarkan perspektif mekanistik. Sedangkan dari perspektif pragmatis, maka partisipasi politik dapat dipandang sebagai tindakan politik yang dapat diamati polanya untuk dibuat prediksi kemasa depan. Rakyat atau khalayak yang berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam politik dikaji dalam paradigma psikologis, karena setiap individu khalayak

---

<sup>6</sup>Prof. Dr. Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Kencana, 2010, hal.177

memiliki filter konseptual, yang berfungsi menyerap atau menolak sosialisasi politik, kampanye politik atau pemasaran politik yang merangsangnya.<sup>7</sup>

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara- negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik (parpol) sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi muncul banyak kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok ini lahir dari masa pasca industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan social baru (*new social movement*). Kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui aksi langsung.

Partisipasi politik menurut Herbert McClosky sebagaimana dikutip oleh Elly M.Setiadi dan Usman Kolip adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>8</sup> Berbeda dengan yang dikatakan oleh Keith Fauls yang dikutip dalam buku Prof. Dr. Damsar adalah memberikan batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok kedalam proses

---

<sup>7</sup>Prof. Dr . Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal.77

<sup>8</sup>Elly M.Setiadi; Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Bandung:Kencana, 2003, hal.129

pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.<sup>9</sup>

Banyak orang bertindak, seperti memberikan demonstrasi, yang merupakan jenis partisipasi tetapi tidak merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan keinginan sendiri melainkan dikarenakan adanya perintah orang lain yang disebut istilah “*Ward Boss*”, istilah ini digunakan untuk orang-orang yang dengan menggunakan paksaan, persuasi atau dengan rangsangan-rangsangan materi mereka yang digunakan untuk memobilisasi orang-orang lain dalam usaha mengejar sasaran mereka.

Banyak tanggapan mengenai apa itu partisipasi politik, jadi jelaslah banyak partisipasi di dalam sistem – sistem politik yang demokratis dan kompetitif mengandung suatu unsur tekanan dan manipulasi. Sebagai definisi umum, sesuai dengan yang diartikan oleh Miriam Budiardjo, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengandirect actionnya, dan

---

<sup>9</sup>Prof. Dr. Damsar, *Op. Cit*, hal.179

sebagainya.<sup>10</sup>Partisipasi politik juga senantiasa mengacu pada semua bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara terorganisir maupun tidak.

### **2.2.2.Sifat Partisipasi Politik**

Di negara- negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan- tujuan serta masa depan masyarakat itu dan menentukan orang- orang yang memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik terdorong keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa dengan kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political effect*).

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik.Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan- kegiatan itu. Hal itu menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi.

---

<sup>10</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia, 2008,hal.367

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa jika berbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pimpinan negara kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

Jika diamati lebih jauh, partisipasi hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja, kegiatan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Jadi yang ditekankan disini adalah unsur kesukarelaan dan spontanitas dari mereka yang ikut dalam kegiatan partisipasi politik. Partisipasi hanyalah kesukarelaan masyarakat atau anggota- anggota lainnya dalam kegiatan- kegiatan politik, baik yang mendukung dan menggugat sistem politik dimana keikutsertaan mereka timbul dari adanya keinginan dari dalam diri. Dalam hal ini tidak ada suatu organisasi seseorang yang memaksakan kemauannya kepada anggota masyarakat agar mereka bersedia mengikuti kehendak orang atau organisasi itu untuk ikut dalam kegiatan politik.

Dalam kegiatan partisipasi politik, kita memang tidak dapat menghindari diri dari adanya pengaruh orang lain atau kegiatan lain. Hal ini karena konsep partisipasi politik tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan. Dalam konsep kekuasaan dinyatakan, bila seseorang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindakan dan orang lain yang semula tidak melakukan tindakan apapun, pada akhirnya mengikuti apa yang diperintahkannya, maka orang yang memengaruhi orang lain itu dianggap mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu



dalam partisipasi politik, bilamana melihat seseorang atau sekelompok memaksakan kemauanya kepada orang lain agar mengikuti perintah dan pengaruhnya, maka kegiatan politik atau partisipasi politik tersebut bersifat dikerahkan atau dimobilisasikan.

Disamping yang ikut kegiatan politik baik yang bersifat partisipasi dan mobilisasi, ada warga masyarakat yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Hal ini adalah kebalikan dari partisipasi dan disebut apatis (*aphathy*).<sup>11</sup> Mereka tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik pada, atau kurang paham mengenai masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk memengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil, dan yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dilingkungan dimana ketidaksertaan merupakan hal yang dianggap biasa. Sebaliknya, ada kemungkinan orang tidak ikut memilih karena berpendapat bahwa keadaan tidak terlalu buruk dan bahwa siapapun yang akan dipilih tidak akan mengubah keadaan itu. Jadi, apatis dalam pandangan ini tidak menunjukkan pada rasa kecewa atau frustrasi, tetapi sebagai manifestasi rasa puas dan kepercayaan terhadap sistem politik yang ada.

Menurut Dedi Irawan, menjelaskan sifat partisipasi politik terdiri dari lima bentuk, yakni;

1. Legal (sesuai prosedur) dan Illegal (tidak procedural)
2. Konvensional (lunak) dan Non Konvensional (kekerasan politik)
3. Otonom dan Mobilisasi

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal.370

4. Mendukung dan Menolak
5. Langsung dan tidak langsung.

### **2.2.3. Bentuk Partisipasi Politik**

Salah satu cara mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk- bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana. Bentuk- bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk memengaruhi bentuk dan jalannya *public policy*.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum adalah pemungutan suara atau dikenal dengan istilah voting, entah itu untuk memilih calon para wakil rakyat, entah untuk memilih wakil negara. Bentuk partisipasi politik menurut James Rosenau dalam buku Prof. Dr. Anwar Arifin ada dua bentuk. Pertama, para pengamat yang memerhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan yang lain. Mereka pada umumnya warga negara yang merupakan khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio dan pemirsa radio), serta aktif dalam diskusi politik, seminar, dan memberikan komentar melalui media masa. Kedua, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi (lobi) dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan maupun di parlemen dan di luar parlemen.<sup>12</sup> Sedangkan menurut

---

<sup>12</sup>Prof. Dr . Anwar Arifin, *Op. Cit*, hal.80

Michael Rush dan Phillip Althof dalam buku Pengantar Sosiologi Politik, mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang menduduki jabatan politik atau administratif, mencari jabatan politik / administratif, menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik, menjadi anggota pasif organisasi politik, menjadi anggota aktif organisasi semi-politik ( quasi-political ), menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik, menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya, menjadi partisipan dalam diskusi politik informal, menjadi partisipan dalam pemungutan suara ( voting ).<sup>13</sup>

Hierarki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai tipe sistem politik, tetapi arti masing-masing tingkat tersebut bisa berbeda dari sistem yang satu ke sistem politik yang lain. Selain itu, Rush dan Althoff juga mengingatkan bahwa partisipasi pada suatu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi.

Gabriel A. Almond menganggap partisipasi terbagi dua bentuk, partisipasi politik konvensional yang merupakan bentuk partisipasi “normal” dalam demokrasi modern yang terdiri atas pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif, dan bentuk partisipasi Non Konvensional yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan *Illegal*, penuh kekerasan dan revolusioner yang terdiri dari pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan

---

<sup>13</sup>Michael Rush; Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 122

politik terhadap benda, tindakan kekerasan politik terhadap manusia, perang gerilya dan revolusi.

#### **2.2.4.Fungsi Partisipasi Politik**

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi. Robert Lane dalam studinya tentang keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu- individu:

1. Sebagai sarana mengejar kebutuhan ekonomis
2. Sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhan bagi penyesuaian sosial
3. Sebagai sarana mengejar nilai- nilai khusus
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Dari sisi lain, Arbi Sanit memandang ada tiga fungsi partisipasi politik, yaitu:

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya
2. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah
3. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik.

Partisipasi politik menurut Sudijono Sastroatmodjo juga mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah, partisipasi politik memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk mendorong program- program pemerintah.
2. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan
3. Sebagai sarana untuk membuktikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program- program pembangunan.

#### **2.2.5.Jenis-Jenis Perilaku Masyarakat Dalam Partisipasi Politik**

Sementara itu menurut Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku yaitu:

1. Apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spektator, artinya orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
3. Gladiator, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis, mengadakan tatapmuka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Partisipasi politik di negara-negara demokrasi merupakan hak warga negara, persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari suatu negara ke negara lain, artinya tidak semua warga negara ikut dalam proses politik. Menurut Jefry M. Palge seperti dikutip Ramlan Surbakti dalam buku *Memahami Ilmu Politik*, jenis-jenis partisipasi politik antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif.
2. Partisipasi apatis, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, apabila partisipasi politik cenderung pasif tertekan.
3. Militan (radikal), kepercayaan politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah.
4. Partisipasi pasif, kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).<sup>14</sup>

#### **2.2.6. Alasan Partisipasi Politik**

Dalam kenyataan pada kehidupan politik, tidak sedikit warga negara yang menghindari atau tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap aktivitas politik.<sup>15</sup> Ada beberapa penyebabnya, merujuk pada tipologi tindakan social Max Weber, bahwa seseorang melakukan aktivitas politik karena empat hal, yakni:

---

<sup>14</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, hal.184-185

<sup>15</sup>Prof. Dr. Damsar, *Op.Cit*, hal.191

1. Alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai- nilai suatu kelompok.
2. Alasan emosional afektif, yaitu alasan yang didasarkan atas kebencian atau sukacita terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu.
3. Alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial.
4. Alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.

#### **2.2.7.Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Partisipasi Politik**

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan orang tersebut kepada pemerintah. Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak- hak politik, ekonomi, maupun hak-hak mendapatkan jaminan sosial dan hukum. Sedangkan menurut Myron Weimer setidaknya ada lima penyebab faktor – faktor yang mempengaruhi meluasnya partisipasi politik, yaitu:

1. Modernisasi, komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media komunikasi massa.
2. Perubahan – perubahan struktur kelas sosial. Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan pekerja menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan- perubahan dalam pola partisipasi politik.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern. Kaum intelektual, sarjana, filosof, pengarang dan wartawan sering mengemukakan ide- ide seperti egalitarisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik.
4. Konflik diantara kelompok- kelompok pemimpin politik. Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang bisa digunakan oleh kelompok- kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dan urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Perluasan kegiatan dalam bidang- bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan- tindakan pemerintahan menjadi semakin menyusup kesegala segi kehidupan sehari- hari rakyat.

Menurut beberapa ahli politik seperti, Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, yaitu:

1. Menurut Damsar, faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi meliputi, pendidikan, pekerjaan, pendapatan atau kekayaan.
2. Menurut Arnstein S.R., faktor politik. Partisipasi politik masyarakat didasarkan kepada faktor politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor Politik meliputi Komunikasi politik, Kesadaran Politik,



Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.

3. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, faktor budaya, merupakan sesuatu yang menjadi titik inti tumbuhnya partisipasi politik warga. Budaya kewargaan pada hakikatnya merupakan cermin dari tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokratis dalam masyarakat yang baik.

Dalam konteks Indonesia Arbi Sanit menyebutkan lima faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia, yakni:

1. Adanya kebebasan berkompetisi disegala bidang, termasuk dibidang politik.
2. Adanya kenyataan berpolitik luas dan terbuka.
3. Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan parpol dapat tumbuh subur.
4. Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupaya kekayaan dalam masyarakat
5. Adanya distribusi kekuasaan dikalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

## **2.3. Perilaku Politik**

### **2.3.1. Defenisi Perilaku Politik**

Perilaku politik merupakan tingkah laku elit. Seorang elit politik, dalam menerjemahkan konsep dan teori politik perlu secara langsung terjun kedua politik praktis, sehingga ide-ide politik itu tersalurkan melalui politik praktis

tersebut. Disinilah diperlukan politik yang sejalan dengan gagasan dan teori politik yang ada. Perilaku politik atau political behavior merupakan sebuah keniscayaan dalam berpolitik. Karena seseorang yang berpolitik adalah mereka yang harus bertindak berdasarkan nilai dan gagasan konseptual dalam politik. Disinilah ilmu politik dan teori-teori politik meniscayakan adanya komitmen moral dalam melakukan aktifitas politik.<sup>16</sup>

Perilaku politik menurut Almond dan Powell dapat dirumuskan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi konkretnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik, masih dalam buku yang sama menurut Robert K. Carr menyatakan perilaku politik (*political behavior*) dinyatakan sebagai suatu telah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antar kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Perilaku politik dapat dijumpai didalam negara misalnya, ada pihak yang memerintah dan yang diperintah. Pada dasarnya, manusia yang melakukan kegiatan dibagi menjadi dua, yakni warga negara yang memiliki fungsi pemerintahan (penjabat pemerintahan), dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan (fungsi politik). Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan

---

<sup>16</sup>Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hal.134

(sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut.

Perilaku politik berkenaan dengan tujuan masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum dan bukan tujuan perorangan. Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan sikap politik, yakni yang berkaitan dengan kesiapan bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu suatu penghayatan terhadap objek tersebut.

Perilaku politik tidaklah sesuatu yang dapat berdiri tegak sendiri tetapi mengandung keterkaitan dengan hal yang lain. Salah satu hal yang penting adalah sikap dan perilaku sangat erat hubungannya, namun keduanya dibedakan. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu. Sikap belum merupakan tindakan tetapi masih berupa suatu kecenderungan.

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. Perilaku politik adalah pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak

protes, lobbying, kaukus, kampanye dan demonstrasi). Perilaku politik juga merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang secara individual atau secara kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.<sup>17</sup>

Keengganan orang untuk berperilaku tidak mau terlibat dalam politik, biasanya terjadi dalam budaya politik parokial dan subyek karena proses- proses politik baik berupa pengambilan keputusan, kebijakan, dan keputusan- keputusan politik lainnya lebih banyak didasarkan pada pemikiran pemimpin politik mereka (*top down system*) yang dominan tanpa melibatkan warga negara didalamnya (*bottom up system*). Pandangan atau persepsi elit politik mengapa warga negaranya acuh, apatis terhadap masalah politik karena melekat kuat anggapan bahwa warga negara tidak akan memiliki ide, pendapat atau saran terhadap keputusan apapun yang diambil.

Lain halnya dalam budaya politik partisipan, bahwa warga negara telah memahami peran dirinya dalam sistem politik meskipun dalam format yang kecil. Dengan pemahaman itu, perilaku politiknya tentu memiliki nilai partisipasi lebih tinggi dari bentuk budaya politik parokial dan subyek. Proses *bargaining*, tawar menawar politik, memberikan masukan maupun penetapan yang sangat mungkin terjadi dalam budaya politik partisipan. Dengan demikian, tentu mempengaruhi perilaku politik para aktor politik dalam proses politiknya.

Potensi kegiatan politik warga negara serta keterlibatannya dalam sistem dan struktur politik banyak bergantung pada jenis tingkah laku politik yang lebih tetap dan lebih bertahan. Orang awam yang hidup dalam budaya politik

---

<sup>17</sup> Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Op. Cit*, hal. 19

partisipasi, akan lebih memungkinkan untuk mempertahankan derajat keterbukaannya terhadap komunikasi politik, aktif dalam organisasi ataupun dalam politik formal.

### **2.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik**

Menurut Ramlan Surbakti, terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku aktor/ elit politik:

1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa
2. Lingkungan sosial politik langsung yang memengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu
4. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang memengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.<sup>18</sup>

Sementara disisi lain ada faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat, yakni:

1. Sikap dan perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis masa lalu. Hal ini disebabkan budaya politik tidak

---

<sup>18</sup> Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, hal. 169-170

merupakan kenyataan yang statis melainkan berubah dan berkembang sepanjang masa.

2. Faktor kondisi geografis memberikan pengaruh dalam perilaku politik masyarakat sebagai kawasan geostrategis, walaupun kemajemukan budaya Indonesia merupakan hal yang rawan bagi terciptanya disintegrasi. Kondisi ini mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi politik masyarakat, kesenjangan pemerataan pembangunan, kesenjangan informasi, komunikasi, teknologi mempengaruhi proses sosialisasi politik.
3. Faktor budaya politik memiliki pengaruh dalam perilaku politik masyarakat. Berfungsinya budaya politik ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan bangsa dan struktur politiknya. Kemajuan budaya Indonesia mempengaruhi budaya bangsa. Berbagai budaya daerah pada masyarakat Indonesia berimplikasi pada terciptanya sebuah bentuk perilaku politik dengan memahami budaya politik masyarakat yang dipandang penting untuk memahami perilaku politik.
4. Perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh agama dan keyakinan. Agama telah memberikan nilai etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku politiknya. Keyakinan merupakan acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai agama dan keyakinannya proses politik dan partisipasi warga negara paling tidak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman agama seseorang.

5. Pendidikan dan komunikasi juga mempengaruhi perilaku politik seseorang. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya. Komunikasi yang intens akan mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam kegiatan politiknya.
6. Faktor kepribadian mempengaruhi perilaku politik.
7. Faktor lingkungan sosial politik. faktor ini mempengaruhi aktor politik secara langsung seperti keadaan keluarga, cuaca, ancaman. Lingkungan sosial politik saling mempengaruhi dan berhubungan satu dengan yang lain dan bukannya sebagai factor yang berdiri sendiri.

Selain faktor-faktor diatas ada faktor lain yang memainkan peranan penting dalam menentukan pilihan rakyat, yaitu:

1. Standar hidup,
2. Kondisi gaji atau tidak digaji,
3. Kelompok umur atau seks,
4. Tingkat pendidikan dan agama,
5. Simpati terhadap partai politik.

## **2.4. Budaya Politik**

### **2.4.1. Defenisi Budaya Politik**

Konsep budaya politik pertamakalinya dicetuskan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verbamendefenisikan budaya politik sebagai sikap orientasi yang khas

warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada didalam sistem itu.<sup>19</sup>

Budaya politik merupakan tradisi yang mengakar didalam masyarakat. Budaya politik biasanya dianggap sebagai keyakinan kuat yang secara terus-menerus berulang kali terjadi didalam masyarakat. Di Indonesia, budaya politik atau politik kebudayaan ini sudah mengakar kuat didalam masyarakat sehingga memberikan warna yang sangat berpengaruh terhadap perilaku politik para elit politik. Budaya politik suatu bangsa akan ditentukan oleh seberapa jauh paradigma politik yang dibangun oleh elit-elit politik serta relasi paradigma tersebut dalam kerangka kerja sosial di tengah-tengah masyarakat.<sup>20</sup>Jadi, budaya politik merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya serta cara persepsi terhadap suatu keadaan politik. Budaya politik erat kaitannya dengan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat.Namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti masyarakat umum dengan elit politiknya.

#### **2.4.2.Tipe- Tipe Budaya Politik**

Orientasi kebudayaan politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba sepenuhnya berasal dari orientasi tingkah laku. Kebudayaan politik terjelma menjadi frekuensi dari berbagai jenis orientasi kognitif, afektif dan evaluative, terhadap sistem, secara umum dan tentunya yang berkaitan dengan aspek- aspek input dan outputnya dan sejumlah pribadi sebagai aktor politik.

---

<sup>19</sup>Elly M.Setiadi; Usman Kolip,*Op.Cit*, hal.96

<sup>20</sup>Fatahullah Jurdi, *Op.Cit*, hal.181



Tipe- tipe kebudayaan menurut Almond dan Verba seperti dikutip Elly Setiadi dan Usman Kolip:

1. Budaya politik Parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politik sangat rendah atau merupakan tipe budaya politik dimana ikatan seseorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Dalam tipe budaya politik ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apapun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Individu hanya merasa bahwa mereka terikat dengan kekuasaan yang dekat dengan mereka, misalnya suku, agama, ataupun daerah mereka. Budaya politik Parokial kentara dalam budaya masyarakat yang masih nomaden.
2. Budaya politik Subjek (*subjek political culture*), yaitu budaya politik yang tingkatannya lebih tinggi dari Parokial. Dalam budaya ini individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Individu yang berbudaya politik subjek juga memberikan perhatian yang cukup atas politik akan tetapi sifatnya pasif. Mereka kerap mengikuti berita-berita politik tetapi tidak bangga atasnya dalam arti secara emosional mereka merasa tidak terlibat dengan negara mereka. Saat mereka tengah membicarakan masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman sebab mereka tidak memercayai orang lain begitu saja. Model

masyarakat dalam tipe ini sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif.

3. Budaya politik Partisipan (*partisipant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.<sup>21</sup>

## **2.5. Sosialisasi Politik**

### **2.5.1. Defenisi Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya terhadap gejala- gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman- pengalaman serta kepribadiannya. Dibuku Cheppy Haricahyono dikatakan bahwa sosialisasi politik merupakan bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Elly M.Setiadi; Usman Kolip,*Op.Cit*, hal.101-103

<sup>22</sup>Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta:Tiara Wacana,1991, hal:177

Menurut Gabriel A. Almond dalam buku Sosiologi Politik, Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap- sikap politik dan pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk menyampaikan patokan- patokan politik dan keyakinan- keyakinan politik kepada generasi berikutnya.<sup>23</sup> Sementara dalam buku yang sama menurut Richard E.Dawson, sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai- nilai dan pandangan- pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana- sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa. Jadi Sosialisasi politik merupakan proses mengkomunikasikan suatu informasi tentang politik yang lagi, sedang dan telah berlangsung.

### **2.5.2. Fungsi dan Jenis Sosialisasi Politik**

Menurut Rush dan Althoff dalam buku Sosiologi Politik, sosialisasi politik berfungsi sebagai:

1. Melatih individu dalam memasukkan nilai- nilai politik yang berlaku didalam sebuah sistem politik.
2. Memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi.<sup>24</sup>

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik Rush dan Althoff mengatakan terdapat tiga carayang dapat dilakukan, yakni:

1. Imitasi, melalui imitasi seorang individu meniru terhadap tingkah laku individu lainnya.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal.169

<sup>24</sup>*Ibid*, hal.170

2. Instruksi, gaya ini yang banyak berkembang dilingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando. Melalui instruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai posisinya didalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana dan untuk apa.
3. Motivasi, melalui cara ini individu langsung belajar dari pengalaman untuk membandingkan pendapat dan tingkah sendiri dengan tingkah orang lain. Dapat saja seorang individu yang besar dari keluarga yang beragama secara puritan, ketika besar ia bergabung dengan kelompok- kelompok politik yang lebih bercorak sekuler.<sup>25</sup>

Sementara ada jenis Sosialisasi politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yakni:

1. Formal, sosialisasi yang terjadi melalui lembaga- lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer
2. Informal, sosialisasi yang terdapat dalam masyarakat atau pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok- kelompok sosial yang ada didalam masyarakat.

## **2.6. Pemilihan Kepala Daerah Serentak**

### **2.6.1. Perspektif Teoritis**

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal.172-173

Adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak setingkat gubernur dan walikota/bupati adalah dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara. Kebijakan ini telah disepakati dengan lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota serta Wakil Wali Kota secara serentak.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien. Biaya pilkada untuk kabupaten/kota Rp 25 miliar, untuk pilkada provinsi Rp 100 miliar. Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun. Kalau dilaksanakan secara serentak diperlukan Rp 10 triliun. Lebih hemat dan hanya sekian persen dari APBN.

#### **2.6.1.1. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Sebelum tahun 2005 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011 terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

### **2.6.2. Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)**

Bupati dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai *regent*, dan istilah inilah yang

dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris<sup>[1]</sup>. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan *regent* seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014.

Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas kepala daerah memiliki beberapa kewenang. Namun kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenang dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Berikut kewenangan Kepala Daerah :

1. mengajukan rancangan Perda;
2. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Wakil kepala daerah mempunyai tugas :

1. membantu kepala daerah dalam
  1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
  2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
  3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur
  4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah
3. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. melaksanakan program strategis nasional; dan
7. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Selainnya kewajiban diatas kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dibahas pada tulisan selanjutnya.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan. Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi

pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.<sup>26</sup>

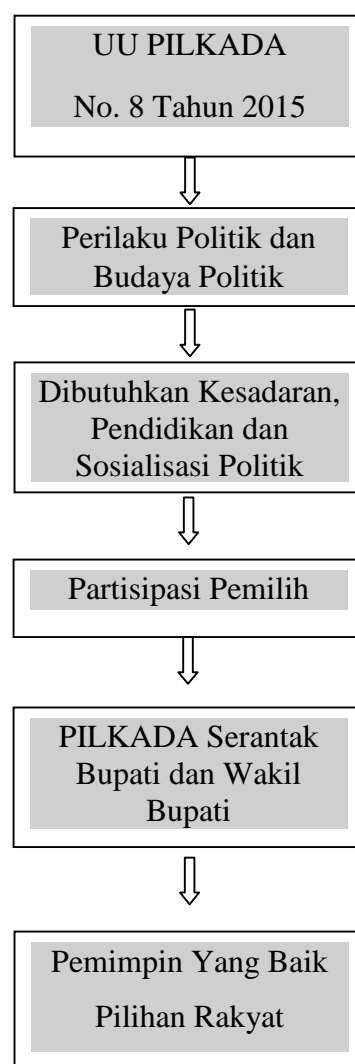
---

<sup>26</sup><http://pemerintah.net/tugas-wewenang-kewajiban-dan-hak-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah/>

## 2.7. Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* seperti dikutip Sugiyono mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>27</sup>

**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir**



<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta, 2010, hal.65

## 2.8. Defenisi Konsep

Untuk mempermudah ketahap selanjutnya penulis akan mengemukakan defenisi konsep antara lain :

1. **Analisis** merupakan kata serapan dari bahasa asing (Inggris) yaitu *analysis*, dari *Isys* menjadi *Isis*. Adapun pengertian analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah masalah guna meneliti struktur masalah tersebut secara mendalam.
2. **Partisipasi** adalah ketelibatan seseorang dalam suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
3. **Politik** usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik/ suatu usaha untuk mencapai kemaslahatan publik.
4. **Masyarakat** adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dan menjadi suatu kesatuan.
5. **PILKADA Serentak** adalah dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalan nya proses pemilihan penyelenggara negara.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat- alat tertentu, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan, sebagai gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini adalah di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan.

#### **3.3. Informan Penelitian**

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Peneliti memilih informan yang yang dipertimbangkan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan, mereka yang menguasai atau memahami permasalahan yang diteliti,

mereka yang masih berkecimpung ataupun telah terlibat pada masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *snowball* untuk memperoleh data dari informan penelitian yang dimana dianggap cukup baik jika jawaban yang diberikan informan selalu sama dengan informan sebelumnya, dengan kata lain bersifat jenuh (*redudancy*). *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula- mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.<sup>27</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan informan utama dan informan kunci. Informan utama yaitu ketua KPUD Nias Selatan, sedangkan informan tambahan yaitu Masyarakat yang memiliki hak pilih pada PILKADA Serentak Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi.<sup>28</sup>

Data diperoleh melalui kegiatan langsung kelokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan wawancara/ observasi kepada informan penelitian (data primer) dan data

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, hal.97

<sup>28</sup> Jhon W.Cresweel, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013, hal. 266

juga berasal dari bahan kepustakaan yang berupa buku- buku, internet, serta dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian (data sekunder).

Menurut John W. Cresweel, langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi kualitatif, merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh.
- b. Wawancara Kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (*interview* dalam kelompok tertentu) terdiri dari 6-8 orang. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.
- c. Dokumen-dokumen kualitatif, selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, diary, surat, *e-mail*).



- d. Materi Audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.<sup>29</sup>

### 3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi atau kondisi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.<sup>30</sup> Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan. Data-data yang telah dikumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari lapangan yang akan diekplorasi secara mendalam, selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan cara Reduksi (*reduction data*), penyajian data(*data display*), dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi, yaitu merangkum, memilih hal- hal pokok, dan memfokuskan pada hal- hal penting. Dengan begitu, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada partisipasi politik masyarakat pada PILKADA serentak Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.267-270

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.274

2. Penyajian Data, setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Data disajikan dengan mengelompokkan sesuai dengan sub bab masing-masing.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu setelah data disajikan, dilakukan penarikan kesimpulan. Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian